

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA AKUNTANSI TERKAIT PENGARUH KUALITAS AUDITING SEKTOR PUBLIK

Sofyan

Institut Agama Islam Negeri Parepare
ladangdakwah704@gmail.com

Nur Amalia

Institut Agama Islam Negeri Parepare
nuramaliash@iainpare.ac.id

Nuraisyah

Institut Agama Islam Negeri Parepare
nuraisyahsr@iainpare.ac.id

Muh Irfan B

Institut Agama Islam Negeri Parepare
muhirfanbim@iainpare.ac.id

Mustariyanti

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Mustariyantics@gmail.com

Nabila Salsabila Burhan

Institut Agama Islam Negeri Parepare
nblaslsbla28@gmail.com

Abd. Hamdi

Institut Agama Islam Negeri Parepare
abdhhamdijh@iainpare.ac.id

**Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)**

Special Edition
Nomor: 7
Halaman: 1-10
Juli 2023

Tanggal Masuk:
21 Juli 2023
Tanggal Revisi:
21 Juli 2023
Tanggal Diterima:
22 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to determine "the level of knowledge of accounting students related to the influence of public sector auditing quality". The dependent variable in this study is a career interest in the field of public sector audits, while the independent variable is the knowledge of accounting students about the quality of public sector audits. The population of this study is an accounting student who has taken the Auditing course. The sampling technique using purposive sampling produces 30 respondents. The results of this study indicate that student knowledge about the quality of public audit sector audits has a significant effect on career interest in the field of auditing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi terkait pengaruh kualitas auditing sektor publik". Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat berkarir di bidang audit sektor publik, sedangkan variabel

Keywords:*Knowledge, Literacy, quality, Public Sector Audit***Kata Kunci:** Pengetahuan, Literasi, kualitas, Audit Sektor Publik

independen adalah pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang kualitas audit sektor publik. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah Auditing. Teknik sampling menggunakan purposive sampling menghasilkan sample sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang kualitas audit sektor public berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir di bidang Auditing.

PENDAHULUAN

Peluang kerja masih terbuka lebar bagi calon lulusan perguruan tinggi. Banyak perusahaan yang mencari fresh graduate untuk menjadi bagian dari perusahaan dalam membangun dan memajukan suatu negara dan lembaga pemerintahan dan salah satu bidang pekerjaan yang mereka cari adalah auditor sektor publik. Audit sektor publik sangat penting dalam memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit mematuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum, undang-undang dan peraturan serta pengendalian internal dan operasi entitas sektor publik dilakukan secara efisien, ekonomis dan efektif. Seorang auditor dihargai karena pengetahuan teknis dan independensinya dalam memberikan keandalan, serta kompetensi dan pengalamannya dalam membantu perusahaan meningkatkan operasinya. Auditor membuat dan membantu mengimplementasikan rekomendasi yang meningkatkan laba dengan memperkuat pendapatan atau mengurangi biaya, termasuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dengan meningkatkan pengendalian operasional. Karier sebagai akuntan publik sangat menantang dan menguntungkan secara finansial.

Banyaknya mahasiswa yang ingin menjadi akuntan publik ditunjukkan dengan banyaknya mahasiswa akuntansi yang melamar pekerjaan di kantor akuntan publik sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam ujian penerimaan menjadi akuntan publik di sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP), khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah memiliki nama. Mayoritas profesional muda yang berminat menjadi akuntan publik memulai karirnya dengan bekerja di kantor akuntan publik. Setelah mereka menjadi akuntan publik, mereka bisa pindah ke industri, pemerintahan, atau pendidikan. Mereka mempertahankan gelar akuntan publik, tetapi mereka berpraktik sebagai auditor independen. Meskipun profesi akuntan publik sangat menjanjikan, banyak mahasiswa akuntansi yang menyerah dan mundur dari keinginannya untuk menjadi akuntan publik ketika dihadapkan pada tugas berat dan risiko yang mungkin dihadapi. Mereka menjadi tidak takut dan menyerah karena takut menghadapi risiko yang mungkin bisa menghancurkan karir mereka. Akuntan publik juga menghadapi banyak masalah dan tantangan serius, seperti peningkatan risiko dan tanggung jawab, batasan waktu, standar yang berlebihan, persaingan antar KAP, dan teknologi yang semakin canggih yang harus selalu diikuti (Rahmayani 2016).

Audit sektor publik merupakan proses audit yang diarahkan untuk memeriksa dan memvalidasi serta memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah dan lembaga negara. Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Pelaksanaan audit sektor publik sangat fundamental dan substansial. Terutama untuk melihat akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara kepada publik terkait penggunaan anggaran keuangan. Mengutip Indra Bastian (2007), audit sektor publik merupakan layanan investigasi bagi masyarakat atau lembaga masyarakat dan

politisi yang telah dibiayai. Dalam konteks ini, dana yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut merupakan pungutan pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat. Begitu pentingnya pemeriksaan sektor publik, sehingga ditempatkan dalam dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan ini diharapkan audit sektor publik dapat lebih transparan dan akuntabel tanpa terkontaminasi korupsi dan lain-lain.

Dengan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum korporasi di negara tersebut, pemerintah juga membutuhkan dana yang cukup besar dalam mengelola negara. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, keuangan negara merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap profesi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga harkat dan kualitas jasa profesional dapat terjaga untuk membangun kepercayaan (Subari 2019).

Oleh karena itu, perlu adanya standar etika profesi agar masyarakat dapat percaya akan kualitas pekerjaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung oleh audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah akan memberikan peluang bagi instansi pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, menimbulkan risiko tuntutan hukum terhadap pejabat pemerintah yang melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara seperti lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini mendorong perlunya audit yang berkualitas untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Pemeriksaan mutu juga harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPK atas perannya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit antara lain: integritas, independensi, pengalaman kerja, akuntabilitas, tekanan anggaran waktu, objektivitas, kompetensi, profesionalisme. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa faktor untuk diteliti, faktor yang diambil antara lain pengalaman kerja, kemandirian dan objektivitas.

Akhir-akhir ini banyak permasalahan hukum khususnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di organisasi pemerintahan dengan kasus suap, pungutan liar dan penggunaan aset negara untuk keuntungan pribadi. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dan tegas dalam fungsinya sebagai pemeriksa, dengan melaksanakan setiap rencana audit secara profesional yang dapat memberikan informasi berupa temuan audit yang dapat dipercaya. sebagai cerminan kualitas audit. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup juga dapat dipercaya.

Pemeriksaan yang berkualitas akan memberikan informasi yang memadai kepada organisasi pemerintah yang diperiksa tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2007) yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat faktor-faktor seperti kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisisme profesional auditor yang berperan dalam menentukan kualitas audit (Alim, Hapsari dan Purwanti 2007; Scully 2006; Jamilah 2007).

Berbicara tentang pendapat, BPK memiliki empat kelas pernyataan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Empat tingkat opini tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian, dan Tidak Menyatakan Pendapat. Di Indonesia, opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan prestasi yang diupayakan setiap tahunnya oleh hampir seluruh asosiasi yang berkepentingan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat terjadi karena perolehan opini WTP pada umumnya akan mencerminkan kinerja yang baik di mata publik dan juga pihak lain yang membutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Semakin baik kinerjanya, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya akan semakin mempercayakan pengelolaan keuangan negara kepada pemerintah, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, Selain membantu perencanaan, audit sektor publik juga dapat dipastikan transparansi transaksi yang sesuai dengan Undang-undang dan norma yang berlaku, artinya Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan good governance. Dalam upaya menuju tata pemerintahan yang baik atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Tiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus membuka pintu seluas-luasnya agar semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan dapat berpartisipasi atau berpartisipasi secara aktif, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar pelaporan keuangan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, satuan kerja pemerintah, departemen, dan lembaga negara.

Maka dari itu inilah yang menjadi alasan penulis untuk menganalisis dengan judul tersebut diatas agar membuat para mahasiswa bisa lebih memahami betapa pentingnya audit sektor publik bagi kualitas hidup masyarakat. Karena untuk saat ini minat mahasiswa untuk menjadi akuntan public masih sangat minim seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini harus ada kesiapan literasi terhadap keuangan negara bagi mahasiswa seperti yang dilihat pada sektor swasta itu

sudah mengambil banyak mahasiswa bahkan bisa mengambil 400 mahasiswa dalam satu kelas, berbeda dengan yang diambil oleh sector public hanya 15 sampai 20 orang saja.

METODOLOGI

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2007:72). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 337.759 mahasiswa. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan menggunakan metode convenience dan random sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 30 responden. Penelitian menggunakan jenis data primer yaitu dengan cara menyebarkan

PEMBAHASAN

Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan audit sektor publik, kita pertama kali seharusnya mampu mengembangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Apabila kita berpikir jauh ke depan mengenai audit sektor publik, maka kita harus mempunyai suatu aturan main dalam sistem dan standar akuntansi sektor publik yang lebih maju pula. Di Amerika standar akuntansi pemerintahan telah tertuang dalam Governmental Accounting Standards Board (GASB). GASB ini terbentuk oleh Committee on Accounting in the Public Sector yang merupakan komite dari AAA. Komite ini selalu berpikir ke arah depan agar semua masalah yang berkenaan dengan akuntansi pemerintahan di Amerika selalu tanggap dengan situasi zaman.

Sebagaimana dijelaskan, akuntansi pemerintahan di Indonesia hanya mengacu pada APBN/APBD, dimana pengelolaan dananya menggunakan pembukuan dengan istilah Uang Pertanggungjawaban (UYHD). Selain itu, pembukuan ini hanya mengandalkan cash basis, namun sistemnya sangat sederhana. Sistem tidak lagi mampu mengakomodasi masalah dalam kondisi saat ini. Selain itu perlu juga peningkatan akses kepada mahasiswa terkait program audit sektor publik agar mahasiswa dapat lebih memahami dan meningkatkan minatnya terhadap audit sektor publik karena hal ini sangat terkait dengan masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap suatu negara.

Menurut Mardiasmo yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik adalah alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Meliala berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu peristiwa mulai dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi publik sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lain halnya dengan Bastian, menurutnya akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk dana publik, artinya ada analisis akuntansi dan mekanisme teknis yang dilakukan dalam mengelola dana dari publik. Handayani menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik dari lembaga publik dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut untuk mengelola biaya sosial dan ekonomi secara lebih efisien. Jika tuntutan akuntabilitas publik

oleh berbagai lembaga publik menguat, maka akuntansi manajemen sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Proses klasifikasi dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sektor publik berbeda dengan yang dilakukan oleh sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena tentunya masing-masing memiliki standar sistem akuntansi, disamping perbedaan karakteristik dalam ruang lingkup sektor publik, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk menerapkannya. Secara sederhana, akuntansi di sektor publik umumnya digunakan oleh organisasi sektor publik, seperti masjid, rumah sakit, puskesmas, universitas/sekolah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat (Yuniar 2018)

Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta bukti akuntabilitas dan manajemen. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala yaitu: Objektivitas, Konsistensi, Keterbandingan, Tepat waktu, Ekonomis dalam penyajian laporan, Materialitas Pada dasarnya ada beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi pembuatan laporan keuangan sektor publik. laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual dan akuntansi dana. Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas. Pemerintah menerapkan SAP basis akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAPs dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Christian and Rita 2016).

Uraian ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul, terutama dari aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi. Akuntansi berbeda dengan anggaran, sehingga laporan keuangan Pemda (Laporan Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Aliran Kas) juga berbeda dengan APBD. Penulis juga menjelaskan daur anggaran negara (APBN) dan APBD serta perubahan mendasar dalam APBD di masa pasca reformasi. Di sini dijelaskan mengenai pengertian akuntansi, lingkup dan tujuan akuntansi pemerintahan, lingkungan AKD, stakeholders, dan kelebihan akuntansi dibandingkan tatabuku yang dilaksanakan selama ini oleh Pemda serta mencakup pengertian, sistem pencatatan, dasar dan siklus AKD (Astasari 2018)

Single entry dan double entry dijelaskan dengan memberikan contoh sederhana. Begitu pula untuk kemudahan pemahaman tentang basis kas, akrual, kas modifikasi, dan akrual modifikasi diberikan contoh penjurnalan dalam jurnal umum. Uraian tentang siklus akuntansi dimulai dengan analisis transaksi, kemudian jurnal, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, sampai pada neraca saldo setelah tutup buku. Ada juga yang menjelaskan tentang rekening-rekening (accounts) dalam laporan keuangan daerah, termasuk kodifikasi dan kebijakan akuntansi (definisi, pengakuan dan pengukuran). Rekening-rekening tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, utang, dan ekuitas dana (dalam akuntansi untuk bisnis disebut modal). Secara spesifik menguraikan tentang akuntansi untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat dipandang sebagai suatu pusat laba (profit center) bagi Pemda.

bahwa setiap anggota wajib menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Menjaga integritas, dia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan menjaga obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Kontribusi pemeriksaan ini juga untuk melihat akuntabilitas pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan akuntabilitas kegiatan pemerintah (Costari and Belinda 2021)

Di sektor publik ini pengaruh hukum terhadap praktik auditing lebih besar, sehingga audit di sektor publik ini menempatkan seorang auditor setidak-tidaknya berdasarkan pemeriksaan keuangan dan keteraturan, dan lebih jauh lagi pada penilaian value for money. Jadi audit di sektor publik (pemerintah) ditujukan untuk memberikan jaminan tentang pengendalian internal di entitas pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Gauthier 1991).

Walaupun sudah ada standar dan kode etik profesi, namun masih sering terjadi kasus kolusi dan korupsi atau penyelewengan, sehingga masyarakat mulai meragukan komitmen auditor terhadap kode etik profesi. Jika kode etik dan standar dilaksanakan dengan benar dan konsisten, seharusnya tidak terjadi kasus-kasus penyimpangan tersebut. Untuk itu, auditor pemerintah yang melaksanakan audit atas laporan keuangan departemen (instansi pemerintah) dan badan usaha milik negara (BUMN/BUMD), dituntut untuk bertindak secara profesional dan mematuhi standar pemeriksaan dan aturan perilaku audit yang telah ditetapkan, sehingga kualitas audit dapat terjaga, dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Hunt & Vitell [1986, dalam Khomsiyah & Nur Indriantoro (1998)], bahwa kemampuan seorang profesional untuk dapat memahami dan peka terhadap adanya persoalan etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh budaya lingkungan atau masyarakat tempat profesi itu berada, lingkungan profesional, lingkungan organisasi. atau di mana dia bekerja serta pengalaman pribadinya. Sikap pasif masyarakat, lemahnya sistem pengawasan organisasi profesi auditor terhadap anggotanya, kerjasama yang tidak sehat antara BPKP dengan klien juga mempengaruhi perilaku etis auditor. Padahal menurut Sudibyo (1995), dunia pendidikan akuntansi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku etis auditor (Djamil 20200

Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan transparan dengan memperhatikan value for money yaitu menjamin bahwa uang rakyat dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan pemeriksaan (audit) oleh auditor independen diperlukan. Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk memastikan akuntabilitas publik dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Definisi audit menurut Malan (1984) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai secara objektif bukti-bukti mengenai asersi tindakan dan peristiwa ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pengguna.

Agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil laporan audit atau hasil pemeriksaan tidak berkurang atau bahkan hilang, kualitas audit perlu ditingkatkan. Alasan lain untuk meningkatkan kualitas audit adalah (Elder 1997), bahwa auditor sekarang lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kualitas audit untuk audit non-federal, untuk

dapat menangani risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan, kebutuhan untuk panduan tambahan untuk melakukan audit (Anugrah dan Harsono 2015)

Namun, tampaknya akuntabilitas pemerintah di Indonesia masih terfokus pada pengelolaan keuangan negara. Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di provinsi, kota, maupun kabupaten, mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing secara lebih mendalam. Beberapa kali muncul pernyataan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola pelayanan publik dan penggunaan APBD. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam praktiknya, rasa ingin tahu masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan. Orang ingin tahu lebih banyak tentang apakah pemerintah yang mereka pilih telah beroperasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara. Badan pemeriksa keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas. aspek, pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pelaksanaan pemeriksaan Penetapan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan cara pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK . Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Untuk memperoleh hal tersebut, BPK atau lembaga perwakilannya dapat mengadakan rapat konsultasi.

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD, paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil audit kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan Peraturan Terkait Otonomi Daerah Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyadari masih banyak aspek yang menjadi kelemahan serta celah dalam peraturan perundang-undangan yang seringkali berujung pada peracunan. (Oroh et.al. 2019) Dengan kualitas audit yang profesional dapat membantu Berbicara mengenai pengaruhnya Audit sektor publik bagi masyarakat, itu merupakan hal yang sangat penting dan wajar untuk diketahui khususnya bagi seorang mahasiswa. Kenapa, karena melihat minimnya minat mahasiswa mengenai sektor public itu tentunya akan berdampak kurangnya akses tentang sektor publik dimasa yang akan datang.

SIMPULAN

Akuntansi sektor publik adalah alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Meliala berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu peristiwa mulai dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi publik sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lain halnya dengan Bastian, menurutnya akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk dana publik, artinya ada analisis akuntansi dan mekanisme teknis yang dilakukan dalam mengelola dana dari publik.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan audit sektor publik, kita pertama kali seharusnya mampu mengembangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Apabila kita berpikir jauh ke depan mengenai audit sektor publik, maka kita harus mempunyai suatu aturan main dalam sistem dan standar akuntansi sektor publik yang lebih maju pula. Di Amerika standar akuntansi pemerintahan telah tertuang dalam Governmental Accounting Standards Board (GASB). GASB ini terbentuk oleh Committee on Accounting in the Public Sector yang merupakan komite dari AAA. Sedangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia hanya mengacu pada APBN/APBD, dimana pengelolaan dananya menggunakan pembukuan dengan istilah Uang Pertanggungjawaban (UYHD). Selain itu, pembukuan ini hanya mengandalkan cash basis, namun sistemnya sangat sederhana

Nah dari Uraian ini perlu kita ketahui bahwa untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul, terutama dari aparaturnya Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi. Akuntansi berbeda dengan anggaran, sehingga laporan keuangan Pemda (Laporan Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Aliran Kas) juga berbeda dengan APBD. Penulis juga menjelaskan daur anggaran negara (APBN) dan APBD serta perubahan mendasar dalam APBD di masa pasca reformasi. Di sini dijelaskan mengenai pengertian akuntansi, lingkup dan tujuan akuntansi pemerintahan, lingkungan AKD, stakeholders, dan kelebihan akuntansi dibandingkan tatabuku yang dilaksanakan selama ini oleh Pemda serta mencakup pengertian, sistem pencatatan, dasar dan siklus AKD.

REFERENSI

- Anugerah, R., & Harsono, Sony., 'Pengaruh Kompleksitas Tugas, Kompetensi Serta Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit', *Jurnal Akuntansi*, 2.2 (2015), 139–48
- Astasari, Adisti, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi memilih Karir Sebagai Akuntan Publik (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Di Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Skripsi Universitas Islam Yogyakarta*, 2018, 1–182
- Christian, Arya Bee Grand, and Maria Rio Rita, 'Peran Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menunjang Keberhasilan Usaha', *Jurnal EBBANK*, 7.2 (2016), 77–92
- Djamil, Nasrullah, SE, M.Si, Akt, CA, 'No Title Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Sektor Publik Dan Beberapa Karakteristik Untuk Meningkatkan', *Jurnal*

- Akuntansi Publik*, 2020 [https://akuinssk.uin-suska.ac.id/2012/10/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-audit-pada-sektor-publik-dan-beberapa-karakteristik-untuk-meningkatkannya/#:~:text=Menurut Hunt %26 Vitell %5B1986%2C,lingkungan profesinya%2C lingkungan organisasi atau](https://akuinssk.uin-suska.ac.id/2012/10/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-audit-pada-sektor-publik-dan-beberapa-karakteristik-untuk-meningkatkannya/#:~:text=Menurut Hunt%20Vitell%5B1986%2C,lingkungan profesinya%2C lingkungan organisasi atau)
- Handayani, P T, 'Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi ...', *Maksi Untan*, 12.2 (2015), 1–11 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/34730>>
- Hawani, Iga Putri, and Anisa Rahmayani, 'Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Dan Audit Terhadap Minat Berkariir Dibidang Perpajakan Dan Audit (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Di Wilayah Jakarta Utara)', *Media Akuntansi Perpajakan*, 1.1 (2016), 62–74
- Maksi, Untan., 'Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah', *Jurnal Akuntansi*, (2015), 1-11
- Nevi Costari, and Putri Ariella Belinda, 'Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan', *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1.1 (2021), 58–77 <https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421>
- Oroh, N E, J J Sondakh, S Rondonowo, Sektor Publik, Studi Empiris, B P K Ri, and others, 'Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Analysis of Factors Affecting the Quality of the Results of Examinations Public Sector Audit (Empirical Study Bpk Ri of the Province of North Sulawesi)', 7.4 (2019), 4998–5008
- Subari, Hermawati Hermawan, 'Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendidikan Di Jakarta Pusat', *Cakrawala Management Business Journal*, 2.2 (2019), 322 <<https://doi.org/10.30862/cm-bj.v2i2.40>>
- Yuniar, Sukma, 'tinjauan pustaka 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi Sektor Publik 2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik', 2017, 2018, 8–36
- Afifah, N. (2019). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI terpancar dari padanya . Jual beli merupakan sesuatu yang ر ب م ك ُ yang sepadan dan melalui cara tertentu . Jual beli telah. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09(01), 137.
- Aliakbari, F., Parvin, N., Heidari, M., & Haghani, F. (2021). Efektivitas Marketplace Shopee sebagai Marketplace Belanja Online yang Paling Disukai Mahasiswa. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 24–29.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2020). The social role of Islamic banks in Indonesia during the pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share. *European Journal of Islamic Finance*, (16).

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2023). Gender diversity and firm performances suffering from financial distress: evidence from Indonesia. *Journal of Capital Markets Studies*, 7(1), 91-107.

Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.

Abbas, A., Triani, N., Syahrir, S. N., & Frihatni, A. A. (2021). Do Environmental Compliances Reduce Agricultural Profitability? An Inference from Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 316, p. 04006). EDP Sciences.

Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 79-96.

Addury, M. M., & Pangestu, D. R. (2023). Interactive marketing and relationship quality in Islamic banking: A Parepare case study. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 83-95.

Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence Of Financing Model And Credit Risk On Financial Stability (Study Of Islamic Rural Banks In Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427-444.

Aminah, S., Hannani, H., Marhani, M., Dahlan, M., Jalil, A., & Haramain, M. (2022). Countering radicalism through increasing peaceful da'wah to Indonesian students. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 664-673.

Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.

Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.

Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Astuti, A. R. T. (2024). Islamic Work Ethics, Employee Response, and Job Satisfaction: An Exploration of Indonesian Islamic Banking Employees. *Manajemen Ide dan Inspirasi*, 11(1), 59-72.

Astuti, A. R. T. (2024). Meta-Analysis of Children's Moral Education in the Digital Era: A Bibliometric Analysis (1977-2021). *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(1), 172-182.

Bahri Soi, A., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12, 91-117.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).

Firman, F., Hannani, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.

Firman, F., Sudirman, L., Said, Z., Hannani, H., & Rusdi, M. A. (2023). Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8507-8517.

Frihatni, A. A. (2020). The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 244-250.

Frihatni, A. A., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(4), 88-98.

Frihatni, A. A., Habbe, A. H., Rasyid, S., & Nagu, N. (2023). The impact of Islamic banks' resilience and culture on market share: Evidence from Muslim countries in MENA and ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1041-1049.

Hamid, A., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *IFAR*, 6-16.

Hanafī, S. M., Markarma, A., & Megandani, A. (2022). Sharia Financial Literature In Promoting Religious Moderation In Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 413-444.

Hannani, H. (2021). Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Hannani, H. A. A. K. H., & Zulfahmi, A. R. Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5, 1-17.

Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fīṣabīlillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 830-847.

Hannani, H., Ismail, M., Rusdi, M. A., & Tamsil, T. (2022). INTELLECTUAL

TREASURES OF ULAMA MANDAR TRACING THE DYNAMICS OF ISLAM NUSANTARA IN LAND OF MANDAR. *Al-Qalam*, 28(1), 89-101.

Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis Fiqhul Biah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM*, 260-277.

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafaâ€™™ at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.

Haramain, M., Hannani, H., Aminah, S., Thahir, A., Muliati, M., & Jufri, M. (2022). The contestation of religious radicalism discourses by Indonesian Muslim netizens. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 674-782.

Herman, S., Basri, R., & Said, Z. (2024). Implications of Infertility in Building Household Integrity From an Islamic Legal Perspective (Study in Parepare City). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(1), 1-4.

Idris, M., Soi, A. B., & Yaumi, M. (2024). Local Civilization and Hadîth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of “Sparkling Pearls” in Latoa and its Relevance for Islamic Ethos Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 209-230.

Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *MARITAL_HKI*, 115-130.

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2116162.

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate; is it Theological Inevitability or Sociological Experimentation?. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 60-70.

Muchsin, A. (2023). Actualization of Symbolic Values in the Marriage Series Mandar Customs in Polewali Mandar Regency (Perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 383-388.

Muchsin, A., & Basri, R. (2023). The Impact of Divorce Due to Forced Marriage in Campalagian District, Polewali Mandar Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 389-392.

Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3).

Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.

Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness*

and eGovernment Studies, 15(2), 247-266.

Nurfadhilah, N., & Alimuddin, A. A. (2024). Marketing strategies and halal labels on Non-Food Products in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 632-644.

Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.

Rukiah, R., Frihatni, A. A., Abbas, A., & Uddin, M. N. (2024). The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and its Effect on Economic Growth in Indonesia.

SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024). Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.

Saleh, M. (2024). The Pattern of Education on Aqidah, Worship, The morals of the Santri Tassbeh Baitul Qur'an Islamic Boarding School, Pinrang Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(2), 288-300.

Sangaji, R., Amin, S., Muhammadun, M., Syarifuddin, S., & Usman, B. (2023). Tafsīr Al-Ahkām's Analysis of Demoralization in Cases of Sexual Harassment in Educational Institutions in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 713-733.

Semaun, S., Rasyid, S., & Musmulyadi, M. (2023). INFLUENCE OF SHARIA MARKETING CHARACTERISTICS ON CUSTOMERS'SAVING INTEREST AT INDONESIAN SHARIA BANK MAKASSAR BRANCH. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 126-135.

Shalihah, M. A. Damirah. (2023). Buying and selling broker; the management and islamic view. *KONOMIKA*, 8(1), 79-102.

Soi, A. B., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. (2023). Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 91-117.

Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.

Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS*, 183-199.

Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.

Syatar, A., Abubakar, A., Amiruddin, M. M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1).

Taufik, M., Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *SOSIOLOGI*, 51-66.

Talib, M. T., Hidayati, H., Musmulyadi, M., & Bahtiar, B. (2023). Assessment of effective

communication on patient treatment identity card use at the center for lung health community Makassar City. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 553-560.

Tijjang, B., Junaidi, J., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2023). The role of brand love, trust, and commitment in fostering consumer satisfaction and loyalty. *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1).

Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.

Zubair, M. K. (2023). Exploring The Maqashid Al Shariah Dimension to Evaluate The Management of Baytul Maal. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.

Zubair, M. K., & Nasuka, M. (2023). Models of Ethical Marketing Force in Indonesian Islamic Bank. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 10(2), 381-392.

Zuhri, A., Ramírez-Coronel, A. A., Al-Hawary, S. I., Dwijendra, N. K. A., Muda, I., Pallathadka, H., ... & Sunarsi, D. (2023). Evaluation of the role of Islamic lifestyle in communication skills of Muslim couples. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *MARITAL_HKI*, 1-11.